

ABSTRAK

YAYAT SUHARTONO, 2005-02-003, **Analisis Dampak Kebijakan Terhadap Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pilihan politik Masyarakat Dalam Pemilu Di Provinsi Banten. (Studi Terhadap Implementasi PP 37/2005, PP 37/2006 dan PP 21/2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD)** (dibimbing oleh; Ir. Yahya Rahmana Hidayat.Ph.D) Tesis Universitas INDONUSA Esa Unggul. Jakarta.

Dilatar belakangi oleh munculnya pandangan negatif publik terhadap DPRD pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP No. 37/2005, PP No. 37/2006 dan PP No. 21/2007) yang mengatur tentang fasilitas dan tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang dianggap memberikan implikasi “ekonomi” bagi para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), maka dibuatlah penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui secara empiris dampak yang muncul dari implementasi Peraturan ini terhadap kinerja/prestasi DPRD Propinsi Banten dan terhadap pilihan politik masyarakat pada partai politik/calon legislatif dalam Pemilu 2009 di Provinsi Banten.

Metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan menggunakan Analisis RIA (Regulatory Impact Assesment) di mana di dalam prosesnya, mencakup analisis mendalam terhadap dampak ekonomi dan sosial dari suatu regulasi dan konsultasi dengan para *stakeholder* dengan menggunakan tujuh tahapan analisis yaitu: identifikasi masalah, tujuan yg diharapkan dari langkah yang diambil pemerintah, alternative pilihan, analisis hasil kebijakan, konsultasi kebijakan, penyimpulan dan rekomendasi, implementasi dan review. Hipotesis penelitian asosiatif, populasi penelitian masyarakat Provinsi Banten dengan kriteria khusus, dengan sampel 148 orang responden..

Hasil pengolahan data dengan menggunakan Analisis RIA (Regulatory Impact Assesment), diperoleh hasil PP No. 37/2005, PP No. 37/2006 dan PP No. 21/2007 tidak memberikan kekuatan apapun di dalam memperbaiki kinerja pelayanan DPRD kepada publik sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Karenanya, PP tersebut harus dikaji ulang, khususnya untuk menghasilkan kerangka teknis dan petunjuk pelaksanaannya di lapangan. Terlebih pilihan masyarakat pada partai politik/calon legislatif dalam Pemilu 2009 tidak dipengaruhi oleh implementasi PP No. 37/2005, PP No. 37/2006 dan PP No. 21/2007 . Masalah ini terjadi karena publik atau bahkan konstituen partai politik tidak melihat dan merasakan apa yang menjadi harapan mereka.

ABSTRACT

YAYAT SUHARTONO, 2005-02-003, **The Policy Implementation Analysis of Parliament Performance and The Political Selection in Banten General Election. (A study assessed to The implementation of PP 37/2006, PP 37/2007 and PP 21/2007 The Chairman and The members of Parliament Financial and Protocol Affair.)** (Advisor : Ir. Yahya Rahmana Hidayat Ph.D) Post Graduate Program of INDONUSA Esa Unggul University Jakarta.

The background of this research is based on the negative public opinion toward The Parliament. Since the government established PP No. 37/2005, PP No. 37/2006 and PP No. 21/2007. Deal with facility and allowance for The Chairman and The members of Parliament, this effort give “economic” implication. The objective of the study is to analyze the impact of the rule to Banten Parliament performance and political selection on legislative candidate in Banten General Election held in 2009.

The research design to be used in this research is qualitative descriptive. Data were analyze using Regulatory Impact Assesment (RIA). It define seven steps : Problem identification, the government goals, The alternative choice, policy implementation analysis, consultation policy, resume and recommendation, implementation and review. The research Hypotesis is associative. The populations are the Banten society with the specific criteria, while the samples of the research are 148 respondent.

The result of RIA analysis, that PP No. 37/2005, PP No. 37/2006 and PP No. 21/2007 didn't not give a significant influence to improve the parliament performance. Still the public didn't satisfy with the parliament performance. Thus the rules established have to be recited and studied thoroughly. On the point of view in technical framework. The Government Rules (PP No. 37/2005, PP No. 37/2006 and PP No. 21/2007) will not give high impact to the public selection in general election in 2009.